PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA (STUDI KASUS DESA BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN)

SKRIPSI

Oleh:

Masrany Inda Putri Tambunan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRACT

APPLICATION OF VILLAGE FINANCIAL SYSTEM IN IMPROVING VILLAGE APARATURE PERFORMANCE IN VILLAGE BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, PESAWARAN DISTRICTS

By

Masrany Inda Putri Tambunan

Reporting on village funds using the manual system often results in errors such as incompatibility of results of village fund details, use of the manual system requires paper that is piling up and spending a lot of money in Bogorejo Village. Therefore, the Central Government and BPKP (Financial and Development Supervisory Agency) make a regulation that all villages must apply the village financial system application for the preparation of village financial reports, this is what makes Bogorejo Village implement the siskeudes application The purpose of this study is to determine the application of financial system applications villages in improving the performance of village officials in Desa Bogorejo. The method used in this research is descriptive qualitative analysis, research uses primary and secondary data sources with interview, observation and documentation research techniques. The results of this study indicate that the application of the village financial system in terms of quantity, quality and timeliness of objectives, standards, feedback, tools or facilities, competencies, motives, and opportunities, is good enough so that in terms of performance the village apparatus has improved. The implementation of the village financial system application in managing village finances becomes more transparent and accountable, and then produces a good program especially in the family planning (KB) program that gets a national championship.

Keywords: Application of Siskeudes Application, Village Apparatus Performance.

ABSTRAK

PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA DI DESA BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

Masrany Inda Putri Tambunan

Pembuatan laporan dana desa dengan menggunakan sistem manual sering sekali terjadi kesalahan seperti ketidak sesuaian hasil perincian dana desa, penggunaan sistem manual membutuhkan kertas yang menumpuk dan meghabiskan banyak angaran di Desa Bogorejo. Oleh karena itu Pemerintah Pusat dan BPKP (Badan Pengawasan keuangan dan Pebangunan) membuat peraturan bahwa seluruh desa harus menerapkan aplikasi sistem keuangan desa untuk pembuatan laporan keuangan desa, hal ini yang membuat Desa Bogorejo menerapkan aplikasi siskeudes Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Desa Bogorejo. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik penelitian wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa dari segi kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif, dan peluang, sudah cukup baik sehingga dilihat dari kinerja aparatur desa sudah meningkat. Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa dalam menggelola keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel, kemudian menghasilkan program yang baik terkhusus pada program keluarga berencana (KB) yang mendapat kejuaran tingkat nasional.

Kata Kunci : Penerapan Aplikasi Siskeudes, Kinerja Aparatur Desa.

PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA
(STUDI KASUS DESA BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN)

Oleh
Masrany Inda Putri Tambunan

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi	: **PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA (Studi Kasus Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)**
Nama Mahasiswa	: *Masrany Inda Putri Tambunan*
No. Pokok Mahasiswa	: **1516021037**
Jurusan	: **Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.	**Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**
NIP 19611218 198902 1 001	NIP 19680112 199802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.** .....

Sekretaris : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.** .....

Penguji : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **23 September 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya , Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.

2. Karya tulisan ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim bimbingan dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 September 2019

Yang Membuat Pernyataan

Masrany Inda Putri Tambunan

NPM 1516021037

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Masrany Inda Putri Tambunan dilahirkan di Medan 25 November 1997 Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara, putri dari Bapak Marudut Tambunan dan Elita Rajaguguk Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Sekolah SD Swasta Andreas. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Sunggal, kemudian mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Santo Thomas 3 Medan dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur SNMPTN pada tahun 2015, dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan internal kampus di Persekutuan Doa Oikoumene (PDO) Fisip Unila. Pada tahun 2018 di bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Tengor, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus

MOTTO

Yeremia 29-11 "sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikian firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan".

Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorangpun merendahkanmu

-anonim -

Satu harinya adalah satu kesempatan kamu untuk bisah berubah lebih baik

-anonim-

Menjadi yang terbaik di antara yang baik

-Masrany Inda Putri Tambunan-

PERSEMBAHAN

Dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Yesus Kristus yang senantiasa menyertai, dengan kerendahan hati kupersembahkan karyaku ini kepada:

Bapak dan ibu tercinta saya Marudut Tambunan dan Elita Rajaguguk serta adek- adek ku Martin, Popy ana, Novriana, Maichael yang mendukung, mendoakan, memotivasi dan memberi semangat.

Sahabat dan teman-temanku terkasih yang selalu mendukung dan menghadirkan sukacita

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah Bapaku yang luar biasa atas segala anugrah dan hikmatNya sehingga penulis dapat menyususn skripsi yang berjudul “Penerapan Aplikasi Sitstem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa (Studi kasus : Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SarjanaIlmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku pembimbing utama penulis. Terima kasih atas ilmu, saran, kritikan serta motivasi yang bapak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga bapak sehat dan sukacita selalu.
3. Bapak Budi Harjo, S.sos., M.IP selaku pembimbing kedua dan pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas ilmu, saran, kritikan serta motivasi yang bapak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga bapak sehat dan sukacita selalu.

4. Bapa Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku dosen pembahas dan penguji. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun bagi penulis. Semoga ibu sehat dan sukacita selalu.
5. Terimakasih kepada pemerintahan yang telah memberikan saya kesempatan belajar di Univesitas ini melalui beasiswa yang diberikan.
6. Seluruh dosen dan staf Ilmu Pemerintahan Fisip Unila, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu pemerintahan.
7. Seluruh informan yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tuaku, Marudut Tambunan dan Elita Rajaguguk terima kasih atas segala doa, cinta kasih, dukungan dan motivasi yang selalu diberikan. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan sukacita yang dari padaNya.
9. Kepada adek- adek ku Martin Tambunan, Popy ana Tambunan, Novrina Tambunan, Maichael Tambunan terima kasih atas dukungan dan doa sehingga skripsi ini boleh terselesaikan. Semoga kita bisa menjadi anak yang selalu membanggakan orang tua.
10. Kepada seluruh keluargaku Tulang, Nantulang Bapa uda, Bapa Tua, Tante, Mama tua, Bou, Kaka dan Abang sepupu terimakasih yang selalu mendoakan ku dan mendukungku selama perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi.

11. Terimakasih hasian, Paitua dan sahabat hidup Michael Jeremay Aaron Mandagie yang selalu memberi semangat, motivasi, dan perhatiannya selama proses penyususnan skripsi.
12. Saudaraku terkasih,Tiolina, Devita, Destri, Riris, terima kasih sudah menemani dan menjadi saudara yang baik bagi penulis di tanah rantau ini. Bersyukur buat Tuhan sudah mempertemukan penulis dengan kalian semoga kita selalu diberkati olehNya, serta Kak malini dan kak Febe yang selalu menasehati dan sebagai motivasi ku sukses buat kalian ya kak Tuhan Yesus Memberkati.
13. Teman-teman sepelayanan di PDO Fisip Unila; Mine (Kak, Mirani, Hizkia, Cynthia, Linares, Mazmur, Nico, Mantri, Firsta,), Oracle (Calvin, Roma, Kiki, Mario, Daniel,), Bang Olaf, bang Osman, Aji dan penggurus Miracle sukses selalu dalam segala yang kita kerjakan dan Tuhan memberkati.
14. Teman- teman KKN (Kaka Kaka Nakal) Eva Vitaloka, Syifa, Melda, Tedy bear, Wasri dan bang Mardos Purba trimakasih buat kebersamaan kita selama KKN sukses untuk kita semua ya ce.
15. Teman-teman seperbimbingan penulis sukses selalu buat kita, dan teman-teman Ilmu Pemerintahan 2015 terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis di kampus. Sukses untuk kita semua.

Bandar Lampung, 20 September 2019

Masrany Inda Putri Tambunan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **I**
DAFTAR TABEL ..... **II**
DAFTAR GAMBAR ..... **III**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 16
C. Tujuan Penelitian 16
D. Manfaat Penelitian 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Good Goverance 18
   a. Pengertian Good Governance 18
   b. Mewujudkan Good Governnce 19
   c. Elektronik Governance 21
B. Tinjauan Tentang Desa 23
   a. Desa 23
   b. Pemerintahan Desa 24
   c. Otonomi Desa 27
C. Tinjauan Tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 28
   a. Pengertian Siskeudes 28
   b. Fitur-Fitur Sistem Keuangan Desa 29
   c. Tujuan Siskeudes 31
   d. Tata Kerja Sistem Keuangan Desa 31
   e. Proses Pengelolaan Keuangan Desa 32
D. Tinjauan Kinerja 33
   a. Kinerja 33
   b. Indikator Kinerja 33
   c. Pengukuran Kinerja 37
E. Kerangka Pikir 40

BAB III METODHODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 41
B. Lokasi Penelitian 42
C. Fokus Penelitian 43
D. Informan Penelitian 46
E. Jenis Data `..... 47
F. Teknik Pengumpulan Data 47
G. Teknik Pengelolaan Data 50
H. Teknik Analisis Data 52
I. Teknik Keabsaan Data 54

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi 57
B. Sejarah Singkat Desa Bogorejo 58
C. Monografi Desa Bogorejo 59
D. Kelembagaan 61
E. Struktur Pemeritahan 62
F. Potensi Desa 63

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kuantitas 65
B. Kualitas..... 68
C. Ketepatan Waktu 71
D. Tujuan 74
E. Standar 77
F. Umpan Balik 81
G. Alat Dan Sarana 85
H. Kompetensi 91
I. Motif..... 94
J. Peluang 97

BAB VI SIMPULAN

A. Simpulan 120
B. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Penggunaan SISKEUDES..... 5
2. Penelitian Terdahulu 14
3. Informan 46
4. Tabel Kepala Dusun Desa Bogorejo 62
5. Triangulasi Data 104

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Erro Pada Databese 8
2. Erro Pada Pengangaran 9
3. Siskeudes 28
4. Kerangka Pikir 40
5. Struktur Birokrasi..... 62
6. Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis 2016 89
7. Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan 90
8. Rencana Angaran Biaya Menggunakan Aplikasi Siskeudes..... 100

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Penggunaan SISKEUDES..... 5
2. Penelitian Terdahulu 14
3. Informan 46
4. Tabel Kepala Dusun Desa Bogorejo..... 62
5. Triangulasi Data 104

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Erro Pada Databese 8
2. Erro Pada Pengangaran 9
3. Siskeudes 28
4. Kerangka Pikir 40
5. Struktur Birokrasi..... 62
6. Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis 2016 89
7. Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Tingkat Kecamatan 90
8. Rencana Angaran Biaya Menggunakan Aplikasi Siskeudes..... 100

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis pada proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini selaras dengan Program Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menegah) Nasional 2015-2019 yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI".

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut memberikan tugas kepada pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, serta memberi jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah. Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara profesional, efektif, efesien dan akuntabel,

agar terhindar dari resiko penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi cermin kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelengaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa,.

Pemerintah desa harus lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya dan sumber daya alam serta dalam pengelolaan keuangan desa dan kekayaan desa. Setiap desa diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah desa dalam pembangunan desa.

Pengelolaan dana desa sejauh ini masih termasuk lambat, sering terjadi permasalahan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa. Hal ini terjadi karena kurangnya *skill* (keterampilan) dan pemahaman terkait teknologi informasi (internet) aparatur desa dalam mengelola angaran dana desa, sehinga menyebabkan tindakan-tindakan yang menyimpang yang merugikan dan menghambat kemajuan desa itu sendiri. Hanifah dan Praptoyo, 2015

Pemerintah Pusat Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES). Persiapan ini selaras dengan adanya

perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, dan pemenuhan rekomendasi KPK-RI. Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi keuangan desa yang transparan dan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Siskeudes dapat mengurangi resiko dalam pengelolaan keuangan desa. Program Siskeudes yang dikembangkan saat ini dapat menambah pemahaman yang berbasis komputer sehingga aparatur desa dapat lebih mudah dalam mengelola pembelanjaan pembangunan desa. Hal ini mendorong kesejahteraan desa dan masyarakat juga dapat lebih mudah untuk mengawasi serta menyampaikan semua keluhan.

Aplikasi Siskeudes menggunakan *Microsoft access* dan database *SQLServer* karena merupakan volume transaksi menengah.Namun pada pemakaian aplikasi sikeudes ini terdapat 4 modul

Modul yang dipakai pada penerapan siskeudes yaitu:

1. Modul Pertama : Sebagai kebijakan pengawalan dari Badan Pengawasan, Keuangan dan Pembangunan.
2. Modul kedua: Dapat menjadi gambaran umum, dalam perencanaan dan penganggaran keungan desa
3. Modul ketiga: Sebagai pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa

4. Modul ke empat : Aplikasi Sitem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Sumber:https://www.keuangandesa.info/2016/05/modul pengelolaan-keuangan-desa.html diakses pada 25 Mei 2016)

Modul- Modul diatas dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat digunakan dalam pemberian bimbingan serta konsultasi kepada aparatur pemerintahan desa dan pemerintahan daerah.

Penerapan aplikasi siskeudes diterapkan diseluruh desa yang ada di Indonesia. Gatot Darmasto, Deputi bidang Pengawasan Penyelengaraan Keuangan Daerah pada tanggal 27 November 2015 meminta kepada Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk menyebarkan surat kepada Bupati/ walikota seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan aplikasi yang terbaru untuk mengelola dana desa, Pada tanggal 31 Agustus 2016 telah disebarkan surat himbauan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kepada kepala desa agar menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan seperti tindakan korupsi.

Penerapan aplikasi siskuedes di desa-desa, terdapat 65.460 desa dari 74.958 desa, 405 Kabupaten/Kota yang ada diseluruh Indonesia telah mengimplementasikan aplikasi sikeudes di ambil dari website lampung post dengan penulis Effran Kurniawan, pada tanggal *06 Nov 2017 jam 23:45*(http://www.lampost.co/berita-siskeudes-di-tiga-kabupaten-0-persen).

Penyelenggaraan aplikasi sistem keuangan desa ini sudah dilaksanakan di Lampung, dan Kabupaten yang sudah menerapkan yaitu:

Tabel 1. Desa Yang Menggunakan SISKEUDES

NO	Kabupaten	Perkiraan Desa Menggunakan Siskeudes
1.	Pesawaran	144 Desa
2.	Mesuji	105 Desa
3.	Way kana	221 Desa
4.	Tulang Bawang Barat	93 Desa
5.	Lampung Timur	264 Desa
6.	Tanggamus	299 Desa
7.	Pringsewu	126 Desa
8.	Lampung Utara	232 Desa
9.	Lampung Barat	131 Desa
10.	Pesisir Barat	116 Desa
11.	Tulang Bawang	147 Desa
12.	Lampun Tenggah	80 Desa
13.	Lampung Selatan	155 Desa

Sumber : diolah oleh peneliti 2019

Penerapan aplikasi siskeudes di setiap desa-desa dapat terselenggara maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran memerintahkan seluruh Camat di wilayah Kabupaten Pesawaran agar memberitahu Kepala Desa di wilayahnya masing-masing agar pada Tahun 2017 menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Surat tertanggal 14 Maret 2017 Nomor: 414.1/12221/IV.15/III/2017 Perihal Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ditujukan kepada seluruh Camat di

Kabupaten Pesawaran di tanda tangani Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Ir.Kesuma Dewangsa, MM.

Sumber:https://www.pesawarankab.go.id/informasi-140-siskeudes-wujudkan-pengelolaan-keuangan-desa-yang-transparan-akuntabel-dan-partisipatif.html di di akses pada tanggal 31 Mei 2016 oleh info pesawaran

Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga memudahkan dalam hal pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa. Dirjen Bina Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah memerintahkan seluruh desa di Indonesia untuk menggunakan aplikasi ini. Kabupaten Pesawaran memiliki delapan belas desa, namun desa yang pertama kali menerapkan aplikasi siskeudes yaitu Desa Bogorejo, sejak Maret tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Noviyati selaku Pelaku Pemberdayaan Masyarakat yang dimuat di forumdesa.com :

> "Tinggal kemauan Aparatur Desa untuk belajar menggunakan aplikasi ini. contoh desa yang telah menggunakan SISKEUDES dalam mengelola Dana Desa, Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, salah satu desa yang sejak tahun 2016 merupakan satu-satunya desa yang menggunakan aplikasi SISKEUDES dan sudah up date ke BPKP di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran".
>
> *Sumber:http://www.forumdesa.com/2017/03/implementasikan-siskeudes-tinggal-komit.html* diakses pada tanggal *Kamis, 21 Desember2017*

Berdasarkan Indek Kemajuan Desa (IKD), pada tahun 2015, Desa Maju 391, Desa Berkembang 1.052, Desa Kurang Berkembang 819 Dan Desa Tertinggal 378. Berdasarkan IKD Desa Bogorejo berada pada tahap

berkembang. Bebarapa hal yang dapat dikemukakan tentang Desa Bogorejo adalah sebagai berikut :

1. Potensi ekonomi, Desa Bogorejo memiliki beberapa potensi ekonomi yang perlu di kembangkan yaitu Potensi pertanian, Coklat merupakan komuditas pertanian dengan produktivitas terbesar dan Padi Sebagai komoditas tanaman pangan unggulan desa Bogorejo, namun belum di kelola secara optimal, mata pencaharian masyarakat di Desa Bogorejo sebagian besar adalah bertani dan berkebun, sedangkan mata pencarian lainnya yaitu sektor industri, jasa, PNS, dan TNI/POLRI.
2. Kondisi perekonomian dilihat dari . Tingkat pendidikan rata-rata SLTA, tingkat kesehatan di Desa Bogorejo relative baik, karena kader posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan lainnya secara rutin melakukan kunjungan atau pengobatan dan selalu proaktif .
3. keadaan lingkungan, kurang maksimal seperti masih terdapat infrastruktur jalan yang belum di aspal.

Berdasarkan hasil pra-riset. Desa Bogorejo telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa dan seluruh aparatur telah mengikuti kegiatan pelatihan, terkhusus pada kepala desa bapak Hermansyah, sekertaris desa bapak Widodo Sunu dan Kaur keuangan bapak Nyoman.P. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret tahun 2016 di kecamatan Gedong Tataan, khusus Desa Bogorejo menggunkan 3 unit computer, pelatihan dilakukan kurang lebih 2 hari. Adapun kendala-kendala yang terjadi di lapangan, seperti kurangnya pemahaman pada pengoprasian penginputan

data ke siskeudes di akibatkan karena dalam waktu pelatihan dilakukan 2 hari saja dan koneksi internet yang belum strategis, sehingga terjadi error.

Kendala pada pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa, sering mengalami eror pada database, ataupun memerlukan password baru sehingga tidak dapat menjalankan aplikasi siskudes secara valid. Ketidak sesuian Jumlah yang dibelanja melebihi pendapatan yang di entry (Penganggaran), Dalam belanja bidang tidak sesuai kaidah (Error Penganggaran) atau jumlah debet dan jumlah kredit tidak sama sehingga terjadi eror pada penginputan data, PPn dan PPh Lupa di entry (Penatausahaan). Dibawah ini merupakan gambar pada siskeudes yang eror ketika digunakan.

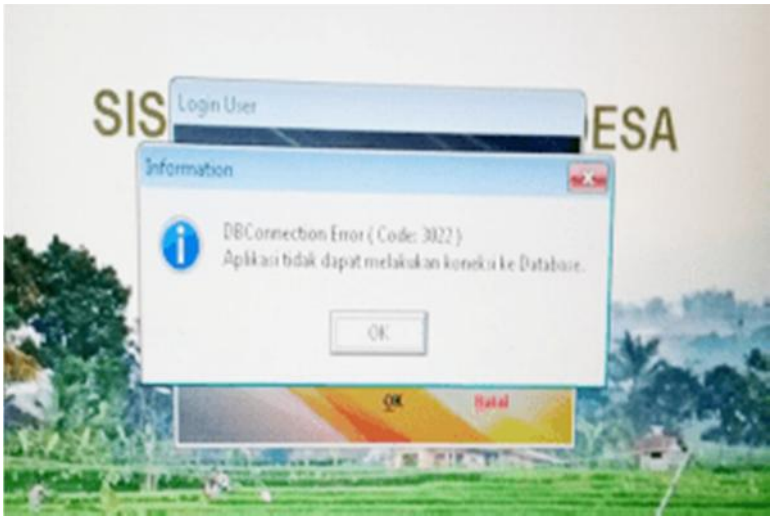

Gambar 1. Error Pada Databese
Sumber: update desa tentang aplikasi siskeudes 2019

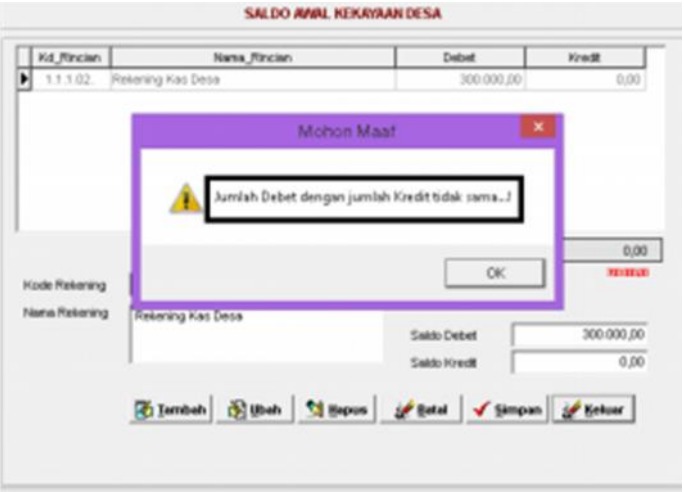

Gambar 2. Error Pada Penganggaran
Sumber: update desa tentang aplikasi siskeudes 2019

Pada penerapan aplikasi siskeudes pemerintah pusat membuat dua koneksi sesuai dengan kondisi desa yaitu Koneksi pertama via *ODBC (Open Database Connectivity)* merupakan koneksi yang secara online sehingga dapat terhubung pada pemerintah daerah dan koneksi yang kedua *Direct Acces* merupakan sistem pembacaan lansung pada file database atau Direct Acces.

Desa Bogorejo sendiri memakai aplikasi siskeudes dengan koneksi *Direct Acces* atau tidak online, namun dari koneksi yang tidak online membuat penggawasan tidak sesuai dengan tujuan awalnya yaitu di awasi dengan secara langsung melalui terhubungnya koneksi dari Desa ke Daerah, hal itu terjadi karena desa sendiri masih kurang memadai terhadap jaringan internet. Aparatur Desa Bogorejo juga mengalami kendala pada penerapannya yaitu fitur tidak dapat berjalan, dan komputer yang digunakan lemot serta memory rentan terinveksi virus. Saat komputer

terkena virus maka file akan rusak dan database tidak dapat dibuka, hal ini membuat kekhawatiran aparat desa ketika memakai aplikasi siskeudes.

Desa Bogorejo pertama kali menggunakan versi 0,5, versi 01 kemudian diperbahuri versi baru yaitu versi 02 yang menyesuaikan dengan Permendagri 20 tahun 2018.

Beberapa yang membedaan versi dari 0.5, 01 dan versi 02 dalam aplikasi sistem keuangan desa yaitu:

1. Versi 0.5 yang membedakan yaitu:

    a. Dirilis tanggal 24 Oktober 2016
    b. Peningkatan fungsi kendali operator, supervisor dan administrator
    c. Posting APBDes bisa dikunci penuh dari menu Tools-Konfigurasi.
    d. Pembulatan RAB Kegiatan 2 digit di belakang koma.
    e. Uraian BKU Desa dan Buku Bank lebih dari 1 baris keterangan.
    f. Cetak Bukti Pencairan SPP Pembiayaan yang semula blank sudah dibetulkan.
    g. Kunci Posting APBDes apabila secara total minus.
    h. Penambahan Fitur Pengembalian Belanja.
    i. Splitter data antar tahun diperbaiki, terutama pada dokumen penatausahaan.

2. Versi 0.1 yang membedakan yaitu:

    a. Dirilis tanggal 22 Desember 2017, Di Update 31-01-2018 point 12 s.d 152.
    b. Penambahan table Ta_KegiatanOutput untuk merekam output kegiatan.
    c. Penambahan input parameter Ref_output dana desa, input data target dan realisasi output.
    d. Penambahan report penyaluran dan penggunaan dana desa sesuai PMK-50
    e. Penyempurnaan report SPJ Panjar rekap lalu dan ini
    f. Penghapusan SPJ Panjar otomatis menghapus Pengembalian Sisa Panjar
    g. Posting ditolak bila ada perubahan APBDes menjadi lebih kecil dari realisasi belanja

h. Penambahan fitur Pajak Daerah dengan kode 7.1.1.xx=pajak pusat, 7.1.2.xx=pajak daerah
i. Rincian RABAwal tidak bisa dihapus bila sudah masuk PAK
j. Nama ibukota desa untuk footer pada saat cetak laporan keungan
k. Filter Cetak Laporan Kompilasi per Kecamatan
l. Fitur pencarian ada saat mengisi referensi output
m. Fitur pencarian pada saat mengisi output DD di penganggaran
n. Format laporan PMK-225 untuk penyerapan Dana Desa Tahun 2018
o. RptRekapDesa di Laporan Kompilasi bisa SQLServer 2000, 2005, 2008 dan 2012
p. mengatasi masalah Timeout Query pada saat cetak laporan kompilasi Pemda.

3. Versi 0.2 yang membedakan yaitu;

a. Direncanakan dirilis tanggal 21 November 2018 2. Perubahan Total mengikuti Permendagri 20 Tahun 2018
b. Perubahan struktur Bidang, SubBidang dan Kegiatan.
c. Perubahan daftar kode rekening APBDesa TA-2019
d. Perubahan Laporan APBDesa, Lampiran Perdes APBDesa
e. Penambahan Laporan RAK (Rencana Anggaran Kas) Bulanan
f. Penambahan Laporan Penjabaran APBDesa
g. Penambahan Laporan DPAL
h. Penambahan Entri Dasar Hukum Perdes dan Perkades
i. Penambahan Fitur Pembuatan Perdes dan Perkades export format Word
j. Penambahan Buku Kas Umum (Tunai+Bank)
k. Perubahan format BKU Tunai dan Perubahan Format BKU Bank
l. Penambahan Buku Kas Pembantu Panjar
m. Perubahan Buku Kas Pembantu Kegiatan
n. Penambahan Buku Kas Pembantu Pajak per Jenis Pajak
o. Perubahan format Kwitansi
p. Perubahan format SPTB (Info Sub Bidang), Perubahan format SPP Panjar dan Definitif bias
q. Perubahan Laporan Semesteran
r. Perubahan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa
s. Perubahan Laporan Periodik susunan bidang sub bidang
t. Perubahan tampilan background aplikasi
u. Perubahan tampilan login aplikasi
v. Peningkatan security Database Acces (dipassword)
w. Peningkatan security SQLServer (ID_Level encryption)
x. Penambahan Kunci dokumen Pencairan dan SPJ oleh Administrator

(Sumber: https://updesa.com/aplikasi-siskeudes/)

Perbedaan yang mendasar pada pemakaian sistem manual dengan sistem siskeudes yaitu sistem manual dalam pelaporannya masih terpisah, sedangkan aplikasi siskeudes dilakukan dengan sekali kerja, tetapi dalam penginputannya juga dilakukan beberapa kali terkait dengan penerapan aplikasi Siskeudes.

Penerapan Sistem Keuangan Desa SISKEUDES, dapat membantu dan meningkatkan kinerja aparatur desa, kemudian memudahkan dalam pelaporan, selain itu untuk menata kelola keuangan desa secara optimal. Fitur- fitur yang terdapat di Aplikasi SISKEUDES dibuat sangat sederhana dan *User Friendly* sehingga memudahkan pengoperasiannya. Sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat, semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pentingnya penerapan aplikasi siskeudes untuk mempercepat kinerja dari aparatur desa dalam pembuatan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance).* Namun masih ada desa belum terpapar aliran listrik, jaringan telekomunikasi lemah, bahkan masih banyak perangkat desa yang belum bisa menggunakan perangkat computer.

Pemeritah pusat meminta agar seluruh desa untuk menerapkan aplikasi siskeudes, sehingga mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan mengenai Penerapan Aplikasi Sistem keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti bahwa Desa Bogorejo yang masih taraf berkembang mampu menerapkan aplikasi sistem keuangan desa, dan membuktikan bahwa layak untuk dipakai diseluruh desa yang ada di Indonesia.

Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa ini merupakan aplikasi yang mudah sehingga benar-benar membantu kinerja aparatur desa agar lebih cepat dan mudah dalam proses pengelolaan dana pembangunan desa. Penerapan aplikasi siskeudes sesuai dengan Pemendagri nomor 20 tahun 2018, sehingga memudahkan dalam pengawasan keuanan desa yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan dan Pembangunan) .

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian tentang meningkatkan kinerja aparatur desa. Penelitian ini digunakan sebagai acuan menambah informasi dan acuan dalam penelitian ini agar sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, penelitian terdahulu yang digunakan yaitu skripsi dan jurnal yang sesuai dengan topik penelitian ini. Berikut ini data hasil dari penelitian terdahulpu:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu Tentang Aplikasi Sikeudes

No	Penelitian	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1.	Gustin Ayu Trisha,dkk	2017	Jurnal	Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanam)
2.	Muhammad Sapril Sardi Juardi, dkk	2018	Jurnal	Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa)
3.	Jehan M. Malahika, dkk	2018	Jurnal	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)

Sumber : diolah oleh peneliti 2019

Penelitian pertama mengkaji tentang peranan sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap kinerja pemerintah desa di Desa Kaba-Kaba. Pada penelitian ini melihat manfaat bagi kinerja dan memudahkan pengelolaan dana desa sehingga lebih terencana dan sesuai dengan ketentun yang telah ditetapkan. Pemakaian Siskeudes dapat memberikan dampak pada para pegawai yaitu memotivasi bagi para pegawai untuk

bekerja dengan baik dan benar, kegiatan operasional yang lebih tertata secara administratif; mengurangi adanya kecurangan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja; dapat menciptakan laporan keuangan yang akuntabel. Pada penggunaan aplikasi siskeudes sangat membatu proses kerja pegawai Desa Kaba- kaba.

Penelitian kedua mengkaji tentang evaluasi penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Fokus penelitian ini pada evaluasi penggunaan aplikasi siskeudes sehingga, menciptakan peningkatan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan desa. Pada evaluasi peneliti memakai teori menurut (Arikunto, 2006), mengukur dan menilai. Berdasarkan pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Jennetallsa bahwa dalam proses penginputan dan pelaporanya sudah terstruktur dengan baik. Aplikasi siskeudes pantas untuk di terapakan, karena telah menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan mewujudkan tata kelolah desa dengan baik.

Penelitian ketiga mengkaji tentang penerapan aplikasi sistem keuangan desa pada organisasi pemerintahan desa, di Desa Suwaan, penerapan aplikasi siskeudes sejak tahun 2017 dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Hasil penelitian ini bahwa dalam penerapan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik. Kemudian pada persiapan pemerintah desa sudah dikatakan siap, karena dari sumber daya aparatur sudah terpenuhi, tetapi dalam penerapan juga masih ada kendala-kendala yaitu sering terjadi masalah eror saat proses penginputan

Berdasarkan penelitian terdahulu ada ruang konsep yang perlu dikaji sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan fokus pada penerapan aplikasi siskeudes dalam menigkatkan kinerja aparatur desa. Peneliti menggunakan teori yang ditemukan oleh Hersey, Blanchard, dan Jhonson (dalam wibowo 2008: 65) dan teori Dharma dengan melihat beberapa indikator yaitu tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif, peluang, kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong tataan, Kabupaten Pesawaran

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dan khasanah pengetahuan dalam bidang Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kinerja aparatur pemenrintahan desa

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi Pemerintah khusus pada peningkatan kinerja aparatur desa dengan penggunaan Aplikasi Siskeudes.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

OECD dan World Bank dalam Sedarmayanti (2009: 273) mengartikan *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Sedarmayanti (2003:2) menyatakan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service*. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik *(good governance*) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi atau lembaga dalam mewujudkan kepemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan

unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada public

Menurut Taschereau dan Campos (Thoha, 2003:63) yang memaknai *good governance* (tata pemerintahan yang baik) sebagai suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen, yakni pemerintah (*goverment),* rakyat (*civil society),* dan usahawan *(business)* yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen tersebut, mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat.

Menurut Robert Charlick dalam Santosa (2008: 130), *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Berdasarkan pengertian diatas menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* yaitu proses penyelenggaraaan kekuasaan negara dalam melaksanakan pemberdayaan, pembangunan dan urusan publik secara efektiv.

b. Mewujudkan *Good Governance*

Upaya mewujudkan tata pemerintah yang baik *(Good Governance)* merupakan tuntutan utama reformasi atau cita-cita Bangsa dan Negara. Menurut Sedarmayanti (2009: 303) ada upaya mencapai sasaran

pembangunan penyelenggaraan negara mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, yaitu:

1. Penataan kembali fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dengan struktur proposional, ramping, luwes dan responsif.
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan.
3. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai tugas dan fungsinya untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
4. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.
5. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-Government*, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Ditambahkan oleh Sunarso (2013: 197) bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan demokratis (*good governance*) harus diambil langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan kejelasan fungsifungsinya yang dituangkan dalam undang-undang, agar tercipta "*checks and balances*" sistem secara hukum.
2. Penataan kelembagaan hukum dan kualitas sumber daya manusia untuk mampu menciptakan supremasi hukum serta terlaksanannya

penegakkan hukum yang nyata. Penyempurnaan produk-produk hukum (perundangundangan) disertai dengan sanksi yang nyata.

3. Penataan dan pembentukan badan-badan kontrol yang lebih independen sebagai sarana pendukung supremasi hukum, penegakkan hukum dan keadilan serta perlindungan masyarakat.
4. Penyempurnaan Undang-Undang Kepegawaian dan Undang-Undang TNI dan Polri agar dapat terciptanya suatu "*civil service institution*" yang handal guna memaksimalkan pelaksanaan fungsi pelayanan dan perlindungan masyarakat.
5. Penuangan butir-butir P4 dalam bentuk dan pedoman perundang-undangan disertai sanksi-sanksi yang jelas sebagai tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara agar memiliki jiwa dan moral Pancasila.
6. Peningkatan kesejahteraan seluruh aparat pemerintahan sebagai persyaratan utama.

c. Electronic Governance

Penerapan *e-Governance* dengan memakai adopsi dan inovasi merupakan, penerapan yang strategis dalam memberi akes informasi dan adanya interaksi antar masyarakat luas dengan pemerintah . *e-Governance* sudah banyak dikemukan oleh para ahli. Bank Dunia dalam Samodra Wibawa (2006:50), mendefenisikan *e-governance* sebagai pengguna teknologi informasi oleh instansi pmerintah (seperti *Wide Area Network* (WAN), Internet *mobile compu, ting*). Menurut

World Bank (dalam Susanto & Wicaksono, 2016) *e-goverment* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi guna meningakatkan kinerja pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good government.*

EGov adalah perkembangan terakhir teknologi informasi di bidang pemerintahan. Menurut Okot-Uma yaitu *The benefit of e-Governance will Continue to depend on the realization of technical advances in Electronik business (eBusiness) in the broadest sense elektronik bisines.* Maka dapat disimpulkan bahwa *e-government* merupakan alat bantu pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahannya secara elektronik guna mewujudkan layanan yang efektif, efisien dan transparan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan e-Governance

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi sarana/layanan publik yang tidak dibatasi sekat saat|waktu dan lokasi, dan juga dengan biaya/ongkos yang terjangkau masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaksi interaktif dengan dunia usaha.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi bersama dengan seluruh/semua lembaga negara dan juga penyediaan sarana/layanan dialog publik.

4. Pembentukan proses/sistem manajemen dan proses/sistem kerja yang transparan dan efisien, dan juga memperlancar transaksi dan sarana/layanan antar lembaga pemerintah.

B. Tinjauan Tentang Desa

a. Desa

Defenisi desa menurut Bintarto dalam Nyoman Beratha (1982: 26), yaitu perwujudan geografis yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Desa menurut Kansil (1983: 80) adalah suatu daerah kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan suatu pemerintahan sendiri. Sedangkan desa menurut Bourman dalam Nyoman Beratha (1982: 26-27) adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal, kebanyakan termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Selanjutnya menurut Pasal 1 Bab I UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa:

> "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

b. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah desa. desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa memiliki tugas pokok Nurcholis dalam Arenawati (2014:62):

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 23 Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa, pasal 24 penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintah
3. Tertib kepentingan hukum
4. Keterbukaan
5. Proposionalitas
6. Profesionalitas

7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efesiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagamaan dan
11. Partisipasi

Pasal 25 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa .

Pemerintah Desa menurut HAW Widjaja (2003:3), penyelengaraan pemerintahan desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pemerintahan desa pasal 18 UUD 1945 menyatakan " Pembagian daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa "

Landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah sebagai berikut Widjaja dalam Arenawati (2014: 63) :

c. Keanekaragaman

bahwa setiap desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi social budaya setempat, seperti kampun, pecan, lembang, hutan, bori atau marga

d. Partisipasi

Penyelengaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakt, agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesame warga desa.

e. Otonomi desa

Memiliki kewenangan bahwa pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan atas hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya.

f. Demokrasi

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi inspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan lembaga kemayarakatan sebagai mitra pemerintahan desa.

g. Pemberdayaan masyarakat

Penyelenggaraan pemerintah desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Ditinjau dari segi hubungan dengan penempatannya dalam susunan tertib pemerintahan, maka desa diberi batasan sebagai berikut: Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “Badan Hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan” yang merupakan

bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. Lebih lanjut dinyatakan bahwa desa-desa tersebut atau nama aslinya yang setingkat adalah.

a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku.
b. Desa wajib melaksanakan tugas kewenangan yang di berikan oleh pemerintahan dan daerah.
c. Untuk melaksanakan tugas kewenangan tersebut kepada desa dapat di berikan sumbangan atau bantuan

c. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan onotomi yang asli bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebalikanya pemerintah berkewajiban menghormati onotomi asli yang di miliki desa tersebut. Menurut Waluyo (2007:207) menjelaskan bahwa agar otonomi daerah dapat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka pemerintah wajib melakukan pembinaaan, fasilitasi, supervisi dan advokasi berupa pemberian arah dan pedoman yang jelas melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, terkait dengan perencanan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengembangan kedepan.

Secara bersamaan pemerintah wajib memberikan fasilitas peluang kemudahan bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam

melaksanakan otonomi, daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

isi otonomi desa mencangkup (Nurcholis 2011;20):

1. Pertahanan dari ancaman binatang buas/atau gangguan dari daerah luar;
2. Keamanan dan ketertiban/polisional.
3. Peradilan;
4. Pekerjaan Umum;
5. Upacara keagamaan; dan
6. Pertanian, perikanan, peternakan

C. Tinjauan Tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

a. Pengertian Siskeudes

Telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sesuai UU Nomor 6 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota. Pengembangan aplikasi keuangan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi atau pemerintahan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa agar mutu pelaporan keuangan semakin profesional, berkualitas, efektif dan efesien.

Sebagaimana diketahui, Siskeudes adalah aplikasi keuangan yang dikembangkan oleh BPKP berkerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kemendesa PDTT untuk digunakan oleh pemerintah desa diseluruh Indonesia dalam pengelolaan dana desa. Dasar- dasar pengembangan Siskuedes yaitu :

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. PP Nomor 43 Tahun 2014 juncto PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. PP Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

b. Aplikasi Fitur Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa.

Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

a. Dokumen Penatausahaan:
b. Bukti Penerimaan;
c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
d. Surat Setoran Pajak (SSP)
e. Dan dokumen-dokumen lainnya
f. Laporan-laporan
g. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana)
h. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan.

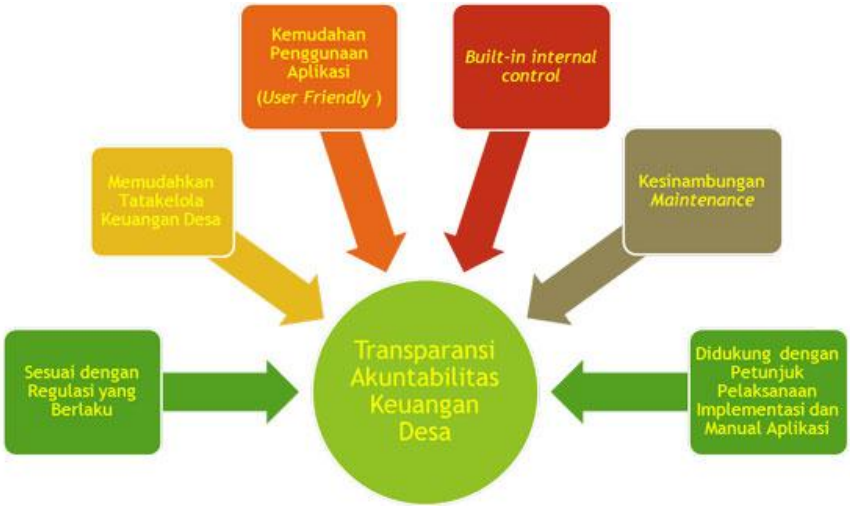

Gambar 3.Fitur Aplikasi Siskeudes

Sumber : *www.bpkp.go.id*

c. Tujuan Siskeudes

a. Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.

b. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Pendirian dan pengelolaan Siskeudes merupakan perwujudan

pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius dalam menjalankan pengelolaan Siskeudes tersebut dapat berjalan efektif, efesien, proporsional dan mandiri.

d. Tata Kerja Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan buku kerja pengelolaan keuangan desa bahwa tata kerja pengelolaan sistem keuangan desa adalah sebagai berikut:

a. Siklus Penganggaran
   1. RAB (Rancangan Anggaran Biaya)
   2. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
b. Siklus Penatausahaan
   1. Tingkat PPTK agar menyusun Buku Pembantu Kegiatan
   2. Tingkat Bendahara agar menyusun
c. Buku Kas Tunai
   1. Buku Bank Buku
   2. Bantu Pajak

d. Siklus Pelaporan

Tingkat Kepala Desa agar menyusun:

1. Laporan Realisasi anggaran
2. Laporan Kekayaan Milik Desa

e. **Proses Pengelolaan Keuangan Desa**

a. Perencaanaan:

1. Keselarasan Perencanaan dalam RPJM dan RKP Desa dengan program Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Tingkat Partisipasi BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RW dan RT.
3. Kualitas RKP Desa

b. Penganggaran:

1. Penyusunan APB Desa
2. Harmonisasi Kepala Desa & BPD
3. Evaluasi APB Desa oleh Kecamatan

c. Pelaksanaan:

1. Pengadaan Barang/Jasa
2. Kewajiban Perpajakan
3. Kewenangan Kepala Desa yang besar

d. Penatausahaan

1. Administrasi pembukuan
2. Cara peng-SPJ-an
3. Pencatatan kekayaan desa
4. Konsep Belanja Modal dan Belanja Barang yang masih rancu

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban:

1. Jumlah Laporan yang harus dibuat
2. Standar Pelaporan

f. Pengawasan

1. Efektifitas pengawasan
2. Kesiapan aparat pengawasan, khususnya APIP Kabupaten/Kota.

D. Tinjauan Kinerja

a. Kinerja

Demi mewujudkan keberhasilan organisasi atau kelembagaan, perlu di adakan pengoptimalan dari setiap aspek pendukungnya, termasuk di dalamnya adalah pengoptimalan kinerja dari setiap staff atau karyawan organisasi atau kelembagaan tersebut. Sampai saat ini banyak di artikan menurut para ahli.

Menurut Rivai, Basri (2005: 14) mendefenisikan kinerja sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas di banding dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang di tentukan terlebih dahuku dan telah di sepakati Bersama.

Kinerja Aparatur Desa juga didefinisikan Rue dan Byars (dalam Keban, 2004:76), sebagai tingkat pencapaian hasil (*the degree of accomplisinment),* karena itu kinerjapegawai dapat dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan yang diinginkan. Dalam pencapaian suatu kinerja dalam suatu kelompok dapat dilihat dari 2 aspek yaitu

1. Hubungan antar kepaduan dengan kinerja kelompok
2. Perbedaan–perbedaan antara pemecah masalah dengan pengambilan keputusan yang di lakukan secara individu dan kelompok.

Salah satu kinerja aparat dapat diartikan sebagai suatu bentuk ukuran efisiensi dan efektivitas tidaknya suatu organisasi dijalankan. Sedangkan menurut Handoko (1986:7) mengungkapkan untuk mengukur kinerja (performance) seseorang ada dua konsepsi utama yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efisiensi ini merupakan konsep matematis atau merupakan perhitungan rasional keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktivitas, performance) disbanding masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu). Dengan kata lain dapat memaksimumkan keluaran dengan masukan terbatas. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang karyawan yang efektif adalah seorang yang dapat memilih pekerjaan yang dapat dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

b. Indikator Kinerja

Indikator kinerja atau *performance indicator* terkadang di pergunakan secara bergantian dengan ukuran dari suatu kinerja, tetapi banyak pula yang membedakannya. Pengukuran dari kinerja sangat berkaitan dengan hasil yang dapat di kuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian. Indikator kinerja juga menganjurkan sudut pandang prospetik (harapan kedepan) daripada retrospektif (melihat kebelakang) dan dipakai untuk aktivitas yang dapat di tetapkan secara kualitatif dan mengusahakan data setelah kejadian.

Indikator di gambarkan menurut Bastian dalam Tangkilisan (2007;78), menguraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

a) Indikator masukan (*inputs),* yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan sebagainya.

b) Indikator pengeluaran *(outputs*), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai sari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.

   a. Indikator hasil *(outcomes*), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran kegiatan pada jangka menegah (efek langsung).

   b. Indikator manfaat (*benefi*t), yaitu sesuatau yangterkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

   c. Indikator dampak (*impacts),* yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negative, pada setiap tingkatan indicator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Kinerja meningkat atau tidaknya dapat dilihat dari adanya dukungan sarana, kompetensi, peluang, standar, dan umpan balik. Terkait dengan ketujuh indikator yang di kemukan oleh Hersey,Blanchard, dan Jhonson dalam (Wibowo 200 :63) dengan penjelasan seperti berikut :

1. Tujuan yang merupakan suatu keadaan yang lebih baik ingin di capai di masa yang akan datang. Dengan demikian tujuan akan mengarahkan kemana kinerja dilakukan.
2. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai, standar dapat menjawab tentang berhasil atau gagal
3. Umpan balik merupakan masukan yang di pergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapain tujuan
4. Alat atau sarana yang di maksud pada sumber daya yang dapat di pergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor pendorong untuk pencapaian tujuan.
5. Kompetensi yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yng di berikan kepadannya dengan baik.
6. Motif, alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu
7. Peluang, pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukan prestasi kerjanya.

Kinerja di lihat dari pencapaian tujuan dan tanggung jawab dalam perspektif pihak yang mempertimbangkan, untuk meningkatkan suatu kinerja yang dilakukan oleh aparatur desa dapat dilihat dari beberapa faktornya yang mampu mempengaruhi kinerja. Pendapat para ahli factor-faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain di kemukan oleh Armstrong dan Baron (1998:16) yaitu :

1. *Personal* Faktor, di tunjukan oleh tingkat ketrampilan, kompetensi, yang di miliki, motivasi, dan komitmen individu.
2. *Leadrship* Faktor, di tentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang di lakukan team leader
3. *Team* Faktor yang di tunjukan oleh kualitas dukungan yang di berikan oleh rekan sekerja
4. *System*, di tunjukan oleh adanya system kinerja dan fasilitas yang di berikan organisasi.
5. *Kontextua*l atau situasional dilihat dari tingginya tingkat tekanaan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

c. Pengukuran kinerja

Ukuran kinerja dapat memberi pengukuran yang jujur dari progres atau prestasi individu atau tim, ukuran kinerja akan memebrikan dasar untuk umpan balik yang terbaik. Pengukuran kinerja memberikan suatu alat untuk menetapkan "angka sebutan" untuk perbandingan sepanjang waktu. Pengukuran kinerja merupakan suatu cara mengukur arah dan kecepatan perubahan, yang dapat diibaratkan seperti meteran pengukur kecepatan dari sebuah mobil.

Pada pengukuran kinerja terdapat dua jenis dalam *Blanced Scorecard* , yaitu :

a. *Outcome* kinerja, *out come* (*legging) measurement.*
b. Pengendalian kinerja , *performance deiver*

Kriteria suatu ukuran menurut Armstrong dan Baron (1998:272) seharusnya adalah:

a. Dilakukan dengan tujuan yang strategis dan mengukur apa yang secara organisasional penting mendorong kinerja.
b. Relevan dengan sasaran dan akuntabilitas tim dan individu yang berkentingan.
c. Memfokuskan pada output yang terukur dan penyelesaian tugas dan bagaimana orang bertindak dan bagaimana tingkah lakunya.
d. Mengindikasikan data yang akan tersediah sebagai dasar pengukuran
e. Dapat diverifikasi, dengan mengusahakan informasi yang akan mengonfirmasi tingkat seberapa jauh harapan dapat di penuhi.
f. Menjadi setepat mungkin dalam hubungan dengan maksud pengukuran dan ketersediaan data
g. Mengusahakan dasar untuk umpan balik dan tindakan.
h. Bersifat komperhensif, mencakup semua aspek kinerja sehingga keluarga ukuran tersediah.

Menurut Dharma (2003;87) mengatakan hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah

keluaran yang dihasilkan. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya)

b) Pengukuran kualitataif keluaran mencerminkan pengukuran "tingkat kepuasaan"yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bantuk keluaran.

c) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidak waktu yang direncanakan Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan

E. Kerangka Pikir

Mewujudkan keberhasilan organisasi atau kelembagaan, perlu diadakan pengoptimalan dari setiap aspek pendukungnya, termasuk didalamnya adalah pengoptimalan kinerja dari setiap staff atau karyawan organisasi atau kelembagaan, sama halnya dengan aparatur desa. Untuk mewujudkan keberhasilan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa didukung oleh Aplikasi Siskuedes.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. dengan indikator kinerja diantaranya tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif dan peluang. Dari penejelasan yang diatas maka peneliti menggambarkan kerangka pikir sebagai berikut

Gambar 4. Kerangka Pikir : Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa (Studi kasus: Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)

Sumber: diolah oleh peneliti 2019

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, maka penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yang di jabarkan dengan Deskriptif. John Creswell (2008) mendefenisikan penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang di mulai dengan indentifikasi masalah atau isu yang akan di teliti.

Metode penelitian kualitatif, Creswell (2008) mendefenisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorai dan memahami suatu gejala sentral, sehingga mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. informasi yang di sampaikan oleh prtisipan kemudian di kumpulkan.

Penelitian kualitatif didefinisikan Ghony dan Almanshur (2016:25) merupakan penelitian yang menekan pada *quality* (kualitas) atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik

kejadian tersebut yang dapat dijadikan pengembangan konsep teori. Data-data yang di peroleh penulis yang berupa kata atau teks kemudian di analisis, dari hasil analisis tersebut dapat berupa penggambaran atau *deskriptif* .

Menurut (Nawawi, 2012), metode penelitian deskriptif dapat di artikan sebagai prosedur pemecah masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian seseorang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat di pahami dan disimpulkan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di tentukan dengan pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut (Herdiansyah, 2012:56) bahwa lokasi penelitian merupakan tempat yang akan di jadikan dalam proses pengambilan data. Lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, alasan peneliti memilih lokasi di Desa Bogorejo karena peneliti ingin mengetahui Penerapan Aplikasi SISKUEDES dapat meningkatkan kinerja pada aparatur pemerintah desa. Desa Bogorejo merupkan desa yang pertama sekali menerapkan aplikasi SISKUEDES di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2016 dan sudah *update* ke BPKP.

C. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpuh pada suatu fokus. Pada dasarnya penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong, (2014:93) dalam penelitian kualitatif, masalah diistilahkan dengan fokus penelitian yang kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian. Oleh karena itu fokus penelitian perlu ditetapkan guna membatasi penelitian serta berfungsi juga untuk memahami informasi yang telah ditemukan di lapangan.

Pada penelitian saat ini yang menjadi fokus peneliti adalah bagaimana penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Seperti apa persiapan yang telah dilakukan aparatur pemerintah desa dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa dan kendala-kendala yang ditemukan ketika menerapkannya sehingga berpengaruh pada sistem kerja aparatur desa .

Penelitian saat ini melakukan analisis dengan menggunakan indikator kinerja oleh Dharma (2003: 87) yaitu kuantitas, kualitas, ketepatan waktu dan menurut Hersey, Blanchard, dan Jhonson dalam (Wibowo 2008:63) fokusnya yaitu dukungan sarana, kompetensi, peluang, standar, dan umpan balik. Oleh karena itu peneliti akan melihat penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini mampu untuk meningkatkan kinerja aparatur.

Adapun indikator yang dipakai peneliti, untuk mengetahui Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini baik atau tidak dalam meningkatkan kinerja aparatur di Desa Bogorejo adalah :

1. Kuantitas
    a. Kuanitas kinerja aparat ketika menggunakan aplikasi siskeudes
    b. Melihat jumlah dokumen atau tugas yang dikerjakan oleh aparat desa
2. Kualitas
    a. Kualitas laporan keuangan desa yang dibuat
    b. Kualitas yang kinerja aparatur desa
3. Ketepatan waktu
    a. Ketepatan dalam membuat laporan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes
4. Tujuan yang merupakan suatu keadaan yang lebih baik ingin di capai di masa yang akan datang.
    a. Tujuan Pemerintah dalam memberlakukan siskeudes di setiap desa
    b. Cara pemerintah memperkenalkan siskeudes demi mencapai suatu tujuan.
5. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai, standar dapat menjawab tentang berhasil atau gagal pemakaian aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa.
    a. Standar yang dibuat untuk mengukur keberhasilan sistem keuangan desa yang diterapakan
    b. Upaya yang dilakukan untuk mencapai standar yang dibuat.

6. Umpan balik merupakan masukan yang di pergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapain tujuan .
   a. Umpan balik dilihat dari respon atau tangapan dari aparatur desa dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa
   b. Pencapaian yang didapat ketika merespon dalam penerapan sistem keuangan desa
7. Alat atau sarana yang di maksud pada sumber daya yang ada di Desa Bogorejo dalam pengoprasian siskeudes sehingga membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses.
   a. Fasilitas yang di berikan baik alat atau sarana
   b. Fasilitas berdasarkan sarana yang dijalankan dengan melakukan BIMTEK (Bimbingan Teknis) dan Pelatihan Khusu
8. Kompetensi, melihat kemampuan yang dimiliki oleh aparatur Desa Bogorejo untuk menjalankan pekerjaan yang di berikan kepadannya denga baik. Kompetensi disini dilihat dari ketersedianya operator dalam menerapkan sistem keuangan desa maupun pemahaman dalam bidang IT
9. Motif, sebagai alasan atau pendorong bagi aparatur Desa bogorejo untuk melakuan sesuatu sehingga mempunyai hasil yang baik pada proses pengelolaan keuangan desa.
   a. Motif mencapai hasil yang baik dilihat dari kendala dalam pemakaian sistem manual
   b. Sistem keuangan desa menjadi solusi untuk mencapai suatu metifasi yang lebih baik

10. Peluang,

a. Peluang yang didapat ketika menerapkan aplikasi siskeudes

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, yakni di Desa Bogorejo dipilih secara *purposive sampling*, yaitu Teknik pengambilan sampel yang di sesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang di tetapkan berdasarkan tujuan peneliti. (Sugiyono, 2006: 54) penentuan informan dilakukan dengan memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang Penerapan Siskeudes yang berpengaruh untuk meningkatkan kinerja perangkat desa sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan penjelasan tersebut maka pihak-pihak yang akan peneliti jadikan sebagai informan dijelaskan pada tabel sebagai berikut yaitu :

Tabel.3 Informan

No	Nama	Jabatan
1	Hermansyah	Kepala Desa
2.	Widodo Sunu	Sekertaris Desa
3.	Sulis Setyawati	Kaur TU dan UMUM
4.	Syafik	PMD Kecamatan
5.	Ayu	Operator Siskeudes Kecamatan
6.	Nyoman Purnomo	Kepala Urusan Keuangan Desa Bogorejo

Sumber : Diolah oleh peneliti 2019

Alasan peneliti fokus pada perangkat desa yakni karena perangkat desalah yang menjalankan dan menerapkan aplikasi sistem keuangan desa ini dan Pemerintaha Kecamatan sebagai perwakilan yang memiliki pengetahuan mengenai aplikasi sistem keuangan desa.

E. Jenis Data

Menurut Neuman (2014:48) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan gambar-gambar yang didapatkan dari dokumen-dokumen, pengamatan dan tulisan-tulisan, gambar-gambar atau foto. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

a. Sumber data primer adalah data utama yang didapat dalam wawancara, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari berbagai narasumber, seperti Perangkat Desa Bogorejo, Badan Pemusyawaratan Desa Bogorejo, dan Pemerintah Kecamatan Bogorejo.
b. Sumber data sekunder adalah data tambahan yang tidak bisa didapat melalui metode awal, data sekunder penelitian ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, serta Pemendagri Nomor 113 dan 114 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan beberapa artikel terkait dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Fuad dan Nugroho (2016: 59) Untuk memperoleh berbagai data akurat dan benar sehingga mampu menjawab

permasalahan penelitian, maka dibutuhkan suatu Teknik dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidaklah cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisanya.

Adapun Teknik pengumpulan data yang akan di aplikasikan sebagai berikut

a. Wawancara

   Metode wawancara menurut Irawan dalam Fuad dan Nugroho (2016:61) merupakan suatu alat pengumpulan data yang digunakan dalam instrumen lainnya, metode wawancara merupakan satu-satunya alat yang diperlukan berpusat pada informan (responden).wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*in depth interview*). Peneliti menyusun poin-poin yang akan di tanyakan kepada informan. Pada proses ini, peneliti mewawancarain aparatur desa, tim siskeudes kecamatan dan masyarakat di Desa Bogorejo. Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

b. Observasi

   Metode penelitian kualitatif yang sering di gunakan adalah observasi., dalam melakukan pengamatan harus terlibat pasif yang artinya peneliti tidak terlibat dengan kegiatan objek peneliti dan tidak berinteraksi dengan mereka secara langsung. Menurut Marsgall dalam Sugiyono (2013: 64) melalui obervasi peneliti belajar tentang perilaku dan

makna perilaku tersebut. Tingkat kehadiran pegawai, dan waktu bekerja pegawai aparatur pemerintah desa .

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung terkait dengan Penerapan Siskuedes Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Desa Bogorejo, selain itu peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

Hal-hal yang perlu di perhatikan oleh peneliti dalam proses observasi (pengamatan) yaitu:

1. Terdapatnya ruang dan tempat.
2. Pelaku, peneliti mengamati ciri-ciri pelaku yang ada di ruang dan tempat.
3. Kegiatan, di mana pengamatan di lakukan pada pelaku yang melakukan kegiatan, sehingga adanya interaksi anatara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya.
4. Peneliti mencatat segala alat atau benda yang du gunakan sehingga dapat berhubungan dengan pelaku .
5. Waktu, penelti mencatat tahapan waku di kegiatan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data skunder yang di perlukan dalam sebuah penelitian, dokumentasi merupakan suatu

bahan yang terltulis yang di terbitkan lembaga-lembaga sebagai objek peneliti.

Menurut Sukardi (2005), dokumentasi adalah cara untuk pengumpulan data melalui bermacam- macam sumber atau dokumen yang ada pada informan. Teknik dokumen di gunakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahn yang akan di teliti.

G. Teknik Pengelolaan Data

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut Efendi.

a. Editing Data

Editing data merupakan suatu proses yang bertujuan agar data yang telah di kumpulkan dapat lebih jelas dan mudah di baca, konsisten dan lengkap. Menurut Efendi, Tukiran dan Sucipto dalam Singarimbun (1995: 240) editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya, peneliti mengolah data hasil wawancara disesuaikan pada pertanyaan-pertannyaan dengan fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang lebih baik sesuai dengan EYD.

Data yang telah di kelola menjadi rangkaian bahasa selanjutnya dikoelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki kerterkaitan dengan informasi, kemudian peneliti memeriksa kembali semua data yang telah di peroleh untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

b. Interpretasi Data

Interpretasi data dapat digunakan untuk mencari makna dan hasi dari penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau juga menganalisi data yang diperoleh, tetapi data juga di interpretasikan sehingga untuk dapat menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian . Interpretasi data menurut Efendi, Tukiran dan Sucipto dalam Singarimbun (1995: 240), pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Peneliti memberikan penjabarab dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus peneliti, pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data – data yang telah memiliki makna akan di lakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

H. Tekhnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2013:244).

Analisis data yang di lakukan adalah analisis yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini objek peneliti yaitu Aplikasi Siskuedes yang terbaru sehingga mampu meningkatkan kinerja dari aparatur desa, Peneliti ingin mengungkapkan apa adanya dengan kenyataan yang telah di observasi di lapangan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Penerapan aplikasi SISKUEDES mampu meningkatkan kinerja aparatur desa, maka dari itu, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik yang di lakukan peneliti yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi, serta peneliti terjun langsung ke lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

a. Reduksi

Reduksi data dapat diartikan sebagai tahap pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti, reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah di kumpulkan dari lapangan penelitian, dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan permasalahan yang di teliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data berguna untuk mempermudah peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial.

c. Verivikasi Data

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Peneliti juga melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

Proses reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Data dianalisis dan diperiksa keabsahannya untuk disimpulkan.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan penelitian dengan data yang terjadi pada obyek penelitian, untuk mendapatkan data yang valid. Menurut Moleong (2014: 24) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan,

yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria. Maka peneliti mengunakan Teknik keabsaan data derajat kepercayaan, dengan menempuh teknik:

a. Kecukupan refrensi

Kecukupan refrensi yang merupakan adanya alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kecukupan refrensi yang peneliti gunakan yaitu barupa alat perekam wawancara. Rekaman wawancara tersebut peneliti gunakan untuk mendukung dan memudahkan peneliti dalam mencatat data dan membandingkan data yang peneliti kumpulkan dan dapatkan dari para informan di lapangan.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, serta dapat di jadikan pembanding atau pengecekan terhadap data yang telah peneliti temukan. Ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Triangulasi teori, dilakukan secara induktif atau secara logika.

Analisis data dalam Penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Triangulasi sumber seperti artikel, hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Bogorejo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran. Luas wilayah Desa Bogorejo adalah 80 Ha Pemukiman Umum, 0,16 Ha Perkantoran, 3,6 Ha Sekolah, 0,3 Ha Tempat Peribadatan, 2,5 Ha Makam, 6 Ha Jalan, dan l32 Ha lain-lain.

Desa Bogorejo memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Sukaraja
2. Sebelah Selatan : Padang Cermin
3. Sebelah Barat : Sukadadi
4. Sebelah Timur : Sukaraja

Jarak Desa Bogorejo ke Ibukota Kecamatan 4 km sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten Pesawaran 3 km dan jarak Desa Bogorejo ke Ibukota Propinsi 30 km dimana ini diukur dengan menggunakan alat transport yang digunakan masyarakat umum di Desa/Kelurahan bersangkutan. Sedangkan waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan ¾ jam, ¾ jam waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten dan ½ jam ke Ibukota Propinsi.

B. Sejarah Singkat Desa Bogoejo

Desa Bogorejo mulanya adalah sebuah Wilayah Kedusunan dari beberapa Dusun yang termasuk Desa Gedong Tataan. Kemudian pada tahun 1985 seluruh warga Dusun Bogorejo menyatakan keinginanya untuk memisahkan diri menjadi sebuah desa. Selanjutnya keinginan masyarakat tersebut ditampung dan dibahas oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam suatu rapat dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun. Kemudian setelah semua sepakat menjadi suatu tekad, hal tersebut disampaikan pada saat rapat desa di Gedongtatan. Setelah disetujui oleh LMD Desa Gedongtatan, kemudian diteruskan ke Kabupaten melalui Camat Gedongtatan.

Pada tanggal 26 maret 1987, dusun Bogorejo disetujui untuk menjadi Desa Persiapan dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Nomor: G/082/B.III/HK/1987, dan sebagai Pjs. Kepala Desa adalah M.Suradi yang sebelumnya menjabat Kepala Desa Gedongtatan. Akhirnya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/272/B.III/HK/1991 tanggal : 12 Juli 1991 Desa Persiapan Bogorejo disahkan menjadi Desa Definitif dengan Pjs Kepala Desa bapak M. Suradi.

C. Monografi Desa Bogorejo

1. Geografi:
    1. Tanah Sawah : 65 ha
    2. Tanah Pekarangan : 462 ha
    3. Tanah Perkebunan : 479 ha
    4. Tanah Hutan Lindung/ Negara : 1.500 ha
    5. Tanah Tegalan : 810 ha
    6. Lain-lain Seluas : 16 ha

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaraja
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukaraj dan PTP X
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kawasan/Hutan Lindung
4. Sebelah Barat berbatasn dengan Desa Sukadadi dan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.

2. Jumlah Penduduk
    a. Jumlah Kepala Keluarga : 1370 kk
    b. Jumlah Jiwa : 4668 jiwa
        1. Laki-laki : 23463 jiwa
        2. Perempuan : 2306 jiwa

3. Kondisi Sosial
    1. Kesehatan
        1. Data usia subur dan peserta KB aktif adalah sebagai berikut ;
            a. Pasangan usia subur dibawah 20 tahun : 42 orang
            b. Pasangan usia subur 20 – 29 tahun : 506 orang

c. Pasangan usia subur 30 – 40 tahun : 295 orang
d. Peserta KB aktif : 671 orang

2. Selain poskesdes yang di kelola oleh bidan desa, Desa Bogorejo mempunyai:
   1. Posyandu MAWAR
   2. Posyandu DAHLIA
   3. Posyandu MELATI
   4. Posyandu ANGGREK
   5. Posbindu 1 Buah (Untuk Lansia)

3. Kesejahteraan Sosial

   1. Sarana Pendidikan
      Jumlah sarana pendidikan di Desa Bogorejo adalah sbb ;
      a. Jumlah TK/Paud : 3 buah
      b. Jumlah SD : 3 Buah
      c. Jumlah SLTP : 1 Buah

   2. Status soial
      Berdasarkan grafik status social warga Desa Bogorejo maka dapat di kelompokan sbb ;
      a. Jumlah Keluarga Prasejahtera : 795 KK
      b. Jumlah Keluarga Sejahtera I : 289 KK
      c. Jumlah Keluarga Sejahtera II : 151 KK
      d. Jumlah Keluarga Sejahtera III : 135 KK

   3. Kebudayaan
      Jumlah grup seni dan budaya yang ada di desa Bogorejo adalah sbb ;
      a. Hadroh : 1 grup

b. Mawalan : 6 grup
c. Kuda Kepang : 1 grup
d. Sanggar tari : 1 buah

4. Tempat Peribadatan

a. Masjid : 8 Buah
b. Mushola : 7 Buah
c. TPA : 5 Buah

5. Ketenagakerjaan

a. Petani/Pekebun : 718 orang
b. PNS : 8 orang
c. TNI-Polri : 5 orang
d. Buruh : 115 orang
e. Wiraswasta : 72 orang
f. Lain-lain : 3684 orang

D. Kelembagaan yang ada

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
2. PKK
3. Karang Tarun

E. Struktur pemerintahan

1. Struktur Desa Bogorejo pada tahun 2019 terdiri dari:

Gambar 5.Struktur Birokrasi

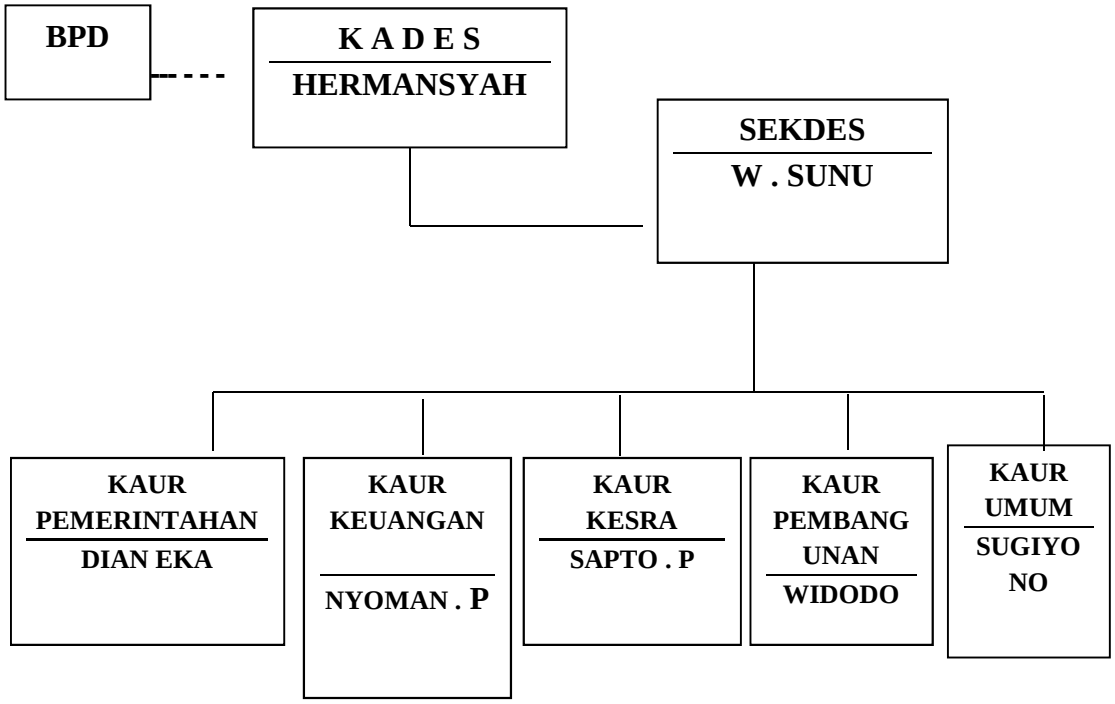

Sumber: Monografi Desa Bogorejo 2019

2. **Tabel 4**. Data Kepala Dusun Desa Bogorejo Periode 2015 -2021

No	Nama	Jabatan
1	Purwanto	Kadus Bogorejo 001
2	Radisan	Kadus Bogorejo 002
3	Rizal Efendi	Kadus Bogorejo 003
4	Sutio	Kadus Bogorejo 004
5	Samin	Kadus Bogorejo 005
6	Maryono	Kadus Bogorejo 006
7	Sarmin	Kadus Bogorejo 007
8	Wagiman	Kadus Bogorejo 008

F. Potensi Desa

1. Potensi Sumber daya alam

   Pengalian potensi sumber daya alam Desa Bogorejo akan lebih dapat di maksimalkan melalui program peningkatan kapasitas masyarakat, agar masyarakat lebih cerdas mengelola dan meningkatkan hasil dan dapat membaca peluang-peluang usaha.

2. Potensi wisata
   1. Air terjum
   2. Bumi perkemahan

VI. SIMPUL DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi system keuangan di Desa Bogorejo sudah diterapkan dari tahun 2016 dan sampai saat ini, desa ini merupakan desa pertama yang menerapkan aplikasi siskeudes di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Penarapan aplikasi sistem keuangan desa ini bertujuan untuk memudahkan kinerja aparatur desa dalam pembuatan laporan keuangan desa, menggurangi terjadinya tindakan korupsi dan dalam menggelola keuangan desa menjadi lebih terpola dan terstruktur dengan baik

Penerapan aplikasi siskeudes ini dapat meningkatkan kinerja aparatur desa, diteliti dengan teori menurut Hersey, Blanchard dan Jhonson serta menggunakan teori Dharma yaitu tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif, dan peluang kemudian diukur dengan kuantitas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa sudah meningkatkan kinerja aparatur desa di Desa Bogorejo dilihat dari segi waktu pelaporan keuangan desa lebih cepat dan laporan yang dibuat lebih berkualitas dan transparan. Meningkatnya kinerja aparatur desa di lihat dari

hasil program yang berhasil misalnya pada Program KB, Desa Bogorejo memenangkan lomba tingkat nasional pada program KB, kemudian dari pelayanan yang dalam pembuatan KTP yang langsung di arahkan oleh aparatur desa. Potensi pada Pertanian dan Perkebunan coklat semakin membaik.

B. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberi saran sebagai berikut

1. Pemerintah daerah dan BPKP sebaiknya lebih meningkatkan kemampuan atau skill operator dengan pelatihan dan bimbingan teknis langsung pada prakteknya bukan hanya sekedar pada penyampaian informasi. Pelatihan yang di selengarakan juga tidak hanya sekali dalam setahun.
2. Ketika pelatihan yang diselengarakan oleh Pemerintah daerah kurang maksimal sebaiknya desa membuat pelatihan khusu sehingga membantu meningkatkan skil bidang IT.
3. Setiap desa sebaiknya memiliki operator yang mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa lebih dari satu orang agar pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa menjadi lebih maksimal
4. Pemerintah Pusat sebaiknya serinng mengupgrade aplikasi siskeudes, sehingga menggurangi masalah yang timbul saat pemakaianny.
5. Sebaiknya aplikasi siskeudes dapat secara online sehingga BPKP dapat langsung mengawasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah ragam Varian Kontemporer.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta : Graha Ilmu .

Ghony, M. Djaunaidi dan Fauzan Almanshur. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta : Ar-Ruzz.

Handoko, Hani.T. 1986. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: BPFE

Kansil, CST. 1985. *Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Akasara Baru.

Kansil CST. 1983. *Pokok- pokok Hukum Kepagawaian Republik Indonesi: Undabf-undang No 8 Tahun 1974.* Jakarta. Pradnya Paramita

Keban, M.S. 2000. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance.* Bandung : Refika Aditama

Moleong dan Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nyoman, Beratha I.1982. *Pembangunan Desa Masyarakat Desa dan pembangunan Desa.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA

Suaedi, Falih dan Bintoro Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara Reformasi Birokrasi dan e-Governance.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sinambela, Litjen Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai Teori, Pengukuran dan Implementasi.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siagian, Sondang.P. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Strategi.* Bandung: Refika Aditama.

Sedarmayanti.2003. *Good Governance: Dalam Rangka Otonomi Daerah.* Bandung. Mandar Maju

Singrimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei.* Pustaka LP3ES, Yogyakarta.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.Bandung:Alfabeta.

Sukardi, 2005. *Metodelogi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya*. Bumi Aksara. Jakarta.

Waluyo. 2010.*Perpajakan Indonesia.* Jakarta. Salemba Empat.

Wibawa, Samodra. 2009. *Administrasi Negar Isu-Isu Kontemporer.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Wibowo. 2008. *Manajemen Kinerja.* Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

Gusti Ayu Trisha Sulina, dkk. 2017. Peranan Sitem Keuangan Desa (SISKUEDES) Terhadap kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). Jurnal Akuntansi. Volume 8 Nomor

Jeacklin Valenia Mamuaya**,** dkk. 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Volume 5 No 2 hal. 1020 – 1030.

Marselinus Ajang. 2015. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. Jurnal Pemerintahan. Volume 3 Nomor. 4 hal. 1871-1884

Muhamad sapril sadi,dkk. 2018. Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. Jurnal Akuntasi Peradaban. (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa) Volume 6 Nomor 1 hal. 84-107

Yogi Hertanto, dkk. 2017. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Blitar). Jurnal Publisia. Volume 2, Nomor 1.

Document

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemendagri Nomor 113 dan 114 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan

Sumber lain

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2454/Peluncuran-SISKEUDES.bpkp diakses pada 5 Agustus 2017 Pukul 21.35

Forum Desa http://www.forumdesa.com/2017/03/implementasikan-siskeudestinggal-komit.html diakses pada 8 Agustus 2017 Pukul 14:25

Pesawarankab.go.id http://www.pesawarankab.go.id/informasi-140-siskeudeswujudkan-pengelolaan-keuangan-desa-yang-transparan-akuntabeldan-partisipatif.html diakses pada 8 Agustus Pukul 15:40

Harian lampug http://harianlampung.com/index.php?k=kawasan&w=pesawaran&i=24784-aparatur- desa-di-pesawaran-dapat-pelatihan-siskeudes

Update Desa https://updesa.com/aplikasi-siskeudes/)